

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI	iv
KATA PENGANTAR.....	v
INTISARI	ix
<i>ABSTRACT</i>	x
DAFTAR ISI.....	xi
DAFTAR TABEL	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Tujuan Penelitian	7
D. Keaslian Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
A. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi.....	14
B. Tinjauan Umum tentang Tentara Nasional Indonesia	26
C. Tinjauan Umum tentang Peradilan Militer	36
D. Tinjauan Umum tentang Asas <i>Lex Specialis Systematis</i>	42
BAB III METODE PENELITIAN	46
A. Jenis Penelitian	46
B. Bahan Penelitian	49
C. Teknik Pengumpulan Data.....	52
D. Analisis Data.....	52
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	56

A. Kewenangan Mengadili antara Peradilan Umum (Pengadilan Tipikor) dengan Peradilan Militer Terhadap Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Anggota TNI dalam Ranah Sipil.....	56
1. Kewenangan Mengadili antara Peradilan Militer dan Peradilan Umum (Pengadilan Tipikor) dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan oleh Anggota TNI.....	58
2. Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Anggota TNI dalam Ranah Sipil	79
B. Prospek Pembaharuan Hukum di Masa yang Akan Datang terkait Tumpang Tindih Kewenangan Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Anggota TNI dalam Ranah Sipil	91
1. Urgensi Pembaharuan Hukum Pidana Kewenangan Mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Anggota TNI.....	93
2. Penguatan Mekanisme Peradilan Koneksitas melalui Pembaharuan Hukum dalam Mendukung Integrasi Penanganan Tindak Pidana Korupsi oleh Anggota Militer bersama Masyarakat Sipil.....	102
BAB V PENUTUP.....	106
A. Kesimpulan	106
B. Saran	107
DAFTAR PUSTAKA	109